BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sering menjadi tolok ukur suatu negara dalam mengelola keuangannya. Akurasi informasi dan menejemen keuangan di negera berkembang cenderung menunjukan titik-titik yang paling lemah. Tidak mengherankan jika misalnya badan kerja sama internasional yang akan dan telah memberi bantuan kepada negara-negara berkembang , merasa kesulitan dalam mengalokasikan dan memantau realisasi penggunaannya.

Akuntansi Pemerintah sebagai suatu sistem yang melaksanakan, pengklasifikasian dan penyajian inforamasi kuantitatif disuatu negara, mempunyai sumbangan yang cukup strategis terhadap keberhasilan pembangunan. Kendala-kendala yang terjadi dalam menyajikan informasi kuantitatif dan dalam rangka pertanggungjawaban pengurus keuangan negara, telah banyak dirasakan sebagai hambatan yang cukup serius dalam era informasi yang menuntut akurasi tinggi. Demikian pula mekanisme pengelolaan keuangan negara yang sering mengahadapi pilihan-pilihan yang dilematis antara kepatuhan menjalankan undang-undang dengan keharusan menerapkan prinsip-prinsip menejemen keuangan yang fleksibel.

Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah dalam hal studi komparatif mengenai sistem akuntansi pemerintah dan menerima alternatif-alternatif yang lebih kondusif telah dimulai sejak tahun 1977 dengan suatu bantuan tenaga ahli dari International Monetary Fund (IMF) yang membantu Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran, melakukan kegiatan pembukuan kekayaan negara lewat dokumen-dokumen

realisasi bantuan tersebut yang diolah pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA).

Dari gambaran tersebut di atas, penulis akan mencoba untuk menguraikan sampai sejauh mana perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia yang diproses pada PPDIA untuk mengahasilkan laporan keuangan negara, dengan judul SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA INFORMASI ANGGARAN (PPDIA) BANDUNG".

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia pada saat ini.
2. Untuk mengangkat kembali ke permukaan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Indonesia yang sedang dalam proses pemantatapan.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pda program Diploma III Ahli Komputer Akuntansi dan Perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3. Metodologi Penelitian.

1.2.1. Studi Kepustakaan (Library Study)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, literatur-literatur dan media informasi lainnya yang berkaitan erat dengan materi pembahasan ini.

1.2.2. Observasi

Dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis sehingga mengahasilkan suatu kesimpulan.

1.4. Pembatasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan pembatasan masalah, sehingga sesuai dengan sasaran yang penulis maksudkan, maka diperlukan pembatasan masalah. Oleh kerena itu, sesuai dengan mata kuliah Ahli Komputer Akuntansi dan Perpajakan maka dalam hal ini penulis akan mebatasi masalah pada Sitem Akuntansi Pemerintah Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman apa yang akan penulis ungkapkan dalam tugas akhir ini maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, masksud dan tujuan, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II bersisi tentang landasan teori dari permasalahan yang penulis ambil yaitu berupa dasar hukum akuntansi pemerintah Indonesia, prinsip dasar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah, serta ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah Indonesia.

Bab III data hasil penelitian tentang sejarah , stuktur organisasi beserta fungsi dan tugas Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran sebagai instansi pengolah data keuangan negara.

Bab IV berisi tentang analisa hasil penelitian berupa informasi berkenaan dengan tugas akhir yang penulis susun berupa sistem akuntansi pemerintah Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara, siklus dan hasil akhir Akuntansi Pemerintah Indonesia.

Bab V dari hasil analisis penelitian tersebut akan penulis simpulkan dan memberikan saran-saran sebagai tindak lanjut dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.